



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Rahma Yunia Fajar Susanti
Theresia Purbandari, S.E, M.Sc
Intan Immanuela, S.E, M.SA

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Katolik Widya Mandala Madiun
rahmaniasusanto@yahoo.co.id

ABSTRAKSI

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan barometer utama suksesnya pelaksanaan otonomi daerah, hal tersebut dikarenakan lewat struktur PAD yang kuat yaitu berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah diharapkan daerah lebih mandiri khususnya dalam membiayai belanja rutin non pegawainya. Tujuan penelitian ini untuk menguji secara empiris pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 38, terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Sampel yang diambil sebanyak 14 kabupaten dan 4 kota berdasarkan kriteria Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang mengunggah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (LRAPBD) selama tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 di situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Untuk menguji hipotesis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan retribusi dan lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, Kinerja Keuangan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah membawa dampak perubahan salah satunya adalah diberikannya kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab.

Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Salah satu cara untuk mengetahui apakah pemerintah daerah telah berhasil menjalankan kewajibannya dengan baik atau tidak adalah dengan menggunakan pengukuran kinerja.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 10 menyebutkan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*), antara lain berasal dari dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Di samping dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, daerah juga dapat membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya melalui pendapatan asli daerah (PAD). Akan tetapi dapat dikatakan bahwa PAD menjadi barometer utama suksesnya pelaksanaan otonomi daerah dan diharapkan dengan adanya otonomi daerah ini, kemandirian daerah dapat diwujudkan lewat struktur PAD yang kuat berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Penelitian ini mereplik penelitian Florida (2006) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatra Utara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Florida (2006) adalah lokasi dan waktu penelitian.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris bahwa:

1. Pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
2. Retribusi daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
4. Lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti
Untuk memperdalam penguasaan ilmu akuntansi yang sudah diterima selama kuliah.
2. Bagi Pihak Luar
 - a. Sebagai informasi kepada publik dan manajemen Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur mengenai kinerja keuangan.
 - b. Sebagai bukti empiris tambahan bagi penelitian selanjutnya tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan otonomi daerah menurut Bastian (2006) adalah menciptakan kehidupan politik yang lebih demokratis, menciptakan sistem yang lebih menjamin pemerataan dan keadilan, memungkinkan setiap daerah menggali potensi natural dan kultural yang dimiliki, dan kesiapan menghadapi tantangan globalisasi, serta yang sangat penting adalah terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan daerah adalah salah satu tolak ukur dari kesiapan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah (Arifin, 2005). Pengukuran kinerja keuangan daerah dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan seperti yang dikutip dari Arifin (2005), yaitu:

1. Tingkat Kemandirian Pembiayaan

Ukuran ini digunakan untuk menguji tingkat kekuatan kemandirian pemerintah kabupaten/kota dalam membiayai APBD setiap periode anggaran. Tingkat kemandirian pembiayaan daerah diukur dengan dua kriteria, meliputi kemampuan daerah dalam pembiayaan dan kemampuan mobilisasi daerah.

2. Tingkat Ketergantungan

Variabel ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Alat analisis yang digunakan adalah analisis derajat otonomi fiskal.

3. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu kabupaten/kota untuk melaksanakan pembangunan. Hal ini berarti pemerintah pusat memberikan otonomi kepada daerah untuk menyelenggarakan program-program regional, sehingga seluruh pertanggungjawaban pengelolaan dan pembiayaannya dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2007) pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang bersal dari sumber ekonomi asli daerah yang dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Rukmana (2013) pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD dan juga merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja keuangan keuangan pemerintah daerah. Semakin mampu suatu pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber kekayaan asli daerahnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan di daerahnya, maka semakin baik pula kinerja keuangan daerah tersebut.

Florida (2006) telah melakukan penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatra Utara. Hasil Penelitian Florida (2006) adalah pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Rukmana (2013) telah melakukan penelitian tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian Rukmana (2013) membuktikan pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan analisis teoritis dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H1: pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Rukmana (2013) retribusi daerah merupakan salah satu sumber PAD dan juga merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin mampu suatu pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber kekayaan asli daerahnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan di daerahnya, maka semakin baik pula kinerja keuangan daerah tersebut.

Penelitian Florida (2006) tentang pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara membuktikan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Wenny (2012) telah melakukan penelitian tentang analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatra Selatan. Hasil penelitian Wenny (2012) membuktikan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan analisis teoritis dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H2: retribusi daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Rukmana (2013) hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan salah satu sumber PAD dan juga merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin mampu suatu pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber kekayaan asli daerahnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan di daerahnya maka semakin baik pula kinerja keuangan daerah tersebut.

Penelitian Florida (2006) tentang pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara membuktikan bahwa hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Wenny (2012) telah melakukan penelitian tentang analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatra Selatan. Hasil penelitian Wenny (2012) membuktikan bahwa hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan analisis teoritis dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H3: hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Pengaruh Lain-lain PAD yang Sah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Rukmana (2013) lain-lain PAD yang sah merupakan salah satu sumber PAD dan juga merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin mampu suatu pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber kekayaan asli daerahnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan di daerahnya, maka semakin baik pula kinerja keuangan daerah tersebut.

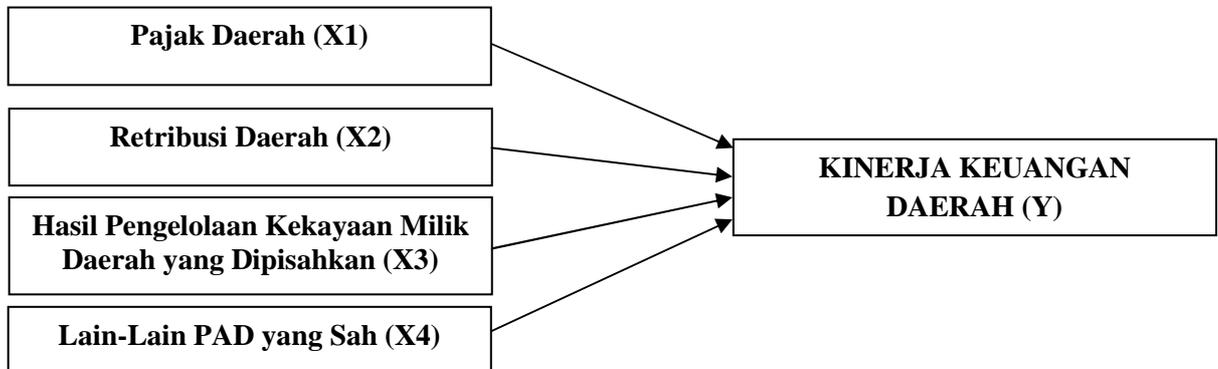
Penelitian Florida (2006) tentang pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara membuktikan bahwa lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Wenny (2012) telah melakukan penelitian tentang analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatra Selatan. Hasil penelitian Wenny (2012) membuktikan bahwa lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan analisis teoritis dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H4: lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Kerangka Konseptual atau Model Penelitian

Berdasarkan kajian empiris dan hasil-hasil penelitian terdahulu maka hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam model penelitian berikut ini:



Gambar 1

Kerangka Konseptual atau Model Penelitian

Gambar tersebut menunjukkan bahwa terdapat empat variabel independen (X) yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah dan satu variabel dependen (Y) yaitu Kinerja Keuangan Daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel, dan Tehnik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah dengan menggunakan cara *purposive sampling* berdasarkan kriteria Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang mempublikasikan laporan realisasi APBD nya di situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia selama tiga tahun berturut-turut, yaitu selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel pendapatan asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sebagai variabel independen, sedangkan kinerja keuangan daerah sebagai variabel dependen.

Kinerja Keuangan Daerah (Y)

Menurut Arifin (2005) kinerja keuangan daerah adalah salah satu tolak ukur dari kesiapan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah. Kinerja keuangan daerah diukur dengan menggunakan pendekatan tingkat kemandirian berupa kemampuan pembiayaan (Arifin, 2005)

$$\text{Kemampuan Pembiayaan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Jumlah Belanja Rutin Non Pegawai}}$$

Pajak Daerah (X1)

Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Besarnya pajak dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada bagian pendapatan asli daerah (Rukmana, 2013).

Retribusi Daerah (X2)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Besarnya retribusi daerah dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada bagian pendapatan asli daerah (Rukmana, 2013).

Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan (X3)

Menurut Halim (2007) hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Besarnya hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada bagian pendapatan asli daerah (Rukmana, 2013).

Lain-lain PAD yang Sah (X4)

Menurut Halim (2007) lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Besarnya lain-lain PAD yang sah dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada bagian pendapatan asli daerah (Rukmana, 2013).

Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam pengujian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data skunder yaitu data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (LRAPBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 yang diperoleh dari situs resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur sebanyak 38 daerah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota dan sesuai kriteria penelitian diperoleh sampel sebanyak 18 daerah yang terdiri dari 14 kabupaten dan 4 kota.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Analisis Diskriptif

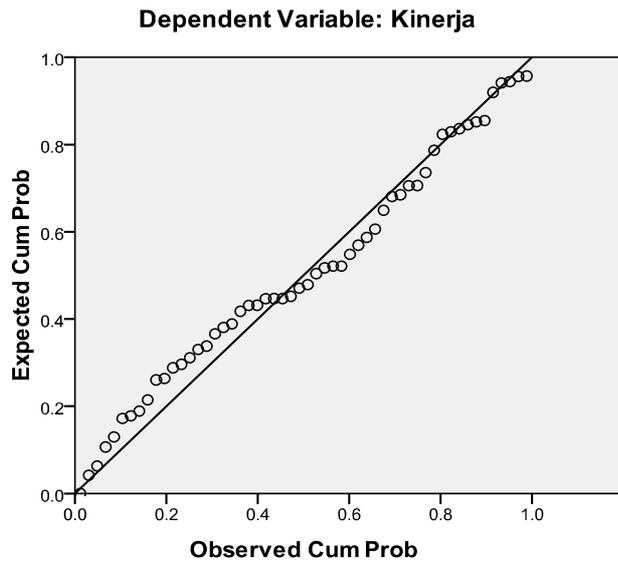
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja	54	.045	.920	.54891	.158348
Pajak	54	4858	158643	28038.39	32378.794
Retribusi	54	6650	60033	22277.46	11761.982
HPKDD	54	467	19400	5439.44	5295.601
PADlain	54	3409	145015	37702.80	28791.427
Valid N (listwise)	54				

*dalam jutaan rupiah

Sumber: data sekunder yang diolah

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: data sekunder yang diolah

Gambar 2
Normal Probability Plot

Menurut Ghozali (2005) jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Pada grafik p-plot menunjukkan bahwa titik-titik berada di sekitar atau mengikuti arah diagonal, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut adalah normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.416	.040		10.352	.000		
	Pajak	2.052E-6	.000	.420	3.026	.004	.495	2.020
	Retribusi	-5.026E-7	.000	-.037	-.294	.770	.589	1.699
	HPKDD	1.255E-5	.000	.420	3.425	.001	.633	1.579
	PADlain	4.917E-7	.000	.089	.807	.424	.776	1.289

Dependent Variable: Kinerja

Sumber: data sekunder yang diolah

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2005). Suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolinieritas jika mempunyai nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Dari tabel 2 di atas tidak ada yang mempunyai nilai *tolerance* kurang dari 0,10 dan nilai VIF lebih besar dari 10, hal ini menunjukkan dalam model ini tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Tabel 3
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.730 ^a	.534	.496	.112467	2.230

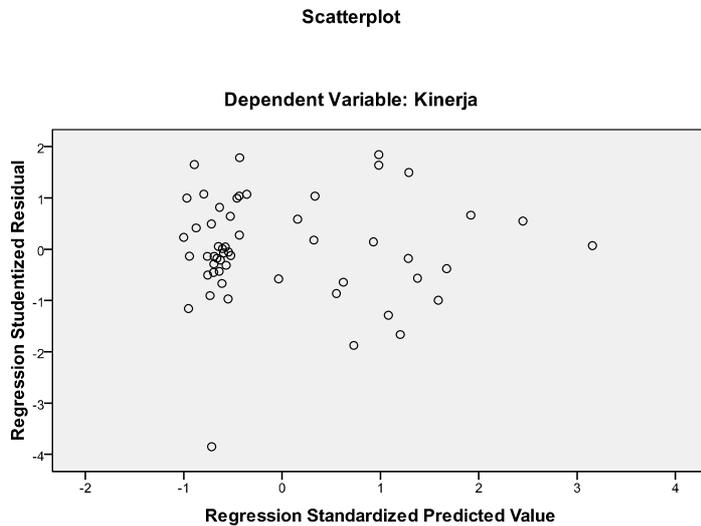
a. Predictors: (Constant), PADlain, Retribusi, HPKDD, Pajak

b. Dependent Variable: Kinerja

Sumber: data sekunder yang diolah

Model regresi terbebas dari autokorelasi jika nilai Durbin Watson hitung antara batas atas *upper bound* ($4-du$) edan ($4-du$), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi (Ghozali, 2005). Pada penelitian ini nilai Durbin-Watson sebesar 2,230, hal ini membuktikan bahwa penelitian ini bebas dari autokorelasi. Ini dapat dilihat dari nilai $du < d < (4-du)$ yaitu $1,724 < 2,230 < 2,276$.

Uji Heteroskedastisitas



Sumber: data sekunder yang diolah

Gambar 3
Grafik Scatterplot

Menurut Ghozali (2005) model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, hal ini dapat dilihat dari pola penyebaran data pada grafik plot, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Dari gambar *scatter plots* di atas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Hasil Penelitian

Persamaan Regresi

Berdasar pada tabel 2, maka dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut:
 $Y = 0,416 + 2,052E-6Pjk - 5,026E-7Ret + 1,255E-5HPKDD + 4,917E-7LainPAD$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, maka dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta 0,416 artinya kinerja mempunyai nilai sebesar 0,416 jika variabel pajak daerah (Pajak), retribusi daerah (Retribusi), hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan (HPKDD), dan lain-lain PAD (LainPAD) bernilai sama dengan nol.
2. Koefisien pajak sebesar 2,052E-6 artinya setiap penambahan pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan kinerja sebesar 0,000002052 dengan asumsi bahwa variabel lain konstan.
3. Koefisien retribusi sebesar -5,026E-7 artinya setiap penambahan retribusi sebesar satu satuan maka akan menurunkan kinerja sebesar 0,0000005026 dengan asumsi bahwa variabel lain konstan.
4. Koefisien HPKDD sebesar 1,255E-5 artinya setiap penambahan HPKDD sebesar satu satuan maka akan meningkatkan kinerja sebesar 0,00001255 dengan asumsi bahwa variabel lain konstan.
5. Koefisien LainPAD sebesar 4,917E-7 artinya setiap penambahan LainPAD sebesar satu satuan maka akan meningkatkan kinerja sebesar 0,0000004917 dengan asumsi bahwa variabel lain konstan.

Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 3, maka diperoleh besarnya R^2 adalah 0,534 yang berarti 53,4% variabel kinerja dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, sedangkan sisanya 46,6% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

Uji Statistik F

Tabel 4
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.709	4	.177	14.016	.000 ^a
	Residual	.620	49	.013		
	Total	1.329	53			

a. Predictors: (Constant), PADlain, Retribusi, HPKDD, Pajak

b. Dependent Variable: Kinerja

Sumber: data sekunder yang diolah

Berdasarkan hasil uji F diketahui F hitung sebesar 14,016 dan nilai signifikansi 0,000 ($p < 0,005$), hal ini berarti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil uji statistik t yang dapat dilihat pada tabel 2, maka pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. H1 diterima. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 3,026 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004 ($p < 0,05$). Hal ini karena pajak daerah bersifat wajib dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa imbalan langsung yang seimbang, sehingga hasilnya bisa bebas dimanfaatkan oleh pemda untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah atau dalam penelitian ini untuk membiayai belanja rutin non pegawai.

2. H2 ditolak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar -0,294 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,770 ($p > 0,05$). Hal tersebut dikarenakan sebagian besar penerimaan retribusi digunakan untuk membiayai belanja rutin pegawai.
3. H3 diterima. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 3,425 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 ($p < 0,05$). Hal tersebut dikarenakan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga hasilnya bisa langsung digunakan pemda untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah atau dalam penelitian ini untuk membiayai belanja rutin non pegawainya.
4. H4 ditolak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 0,807 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,424 ($p > 0,05$). Hal tersebut dikarenakan penerimaan lain-lain PAD yang sah tidak bersifat tetap, salah satu contohnya hasil penjualan aset daerah, tidak setiap bulan atau tahun suatu pemda melakukan penjualan aset daerahnya, sehingga lain-lain PAD yang sah tidak bisa dijadikan penerimaan tetap untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah atau dalam penelitian ini untuk membiayai belanja rutin non pegawai.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pajak daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
2. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
4. Lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Keterbatasan

1. Masih menggunakan peraturan dan undang-undang yang lama.
2. Hanya menggunakan periode waktu selama tiga tahun dan dengan sampel yang terbatas yaitu 18 kabupaten/kota.
3. Hanya menggunakan satu pendekatan dalam mengukur kinerja keuangan daerah.

Saran

1. Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar disesuaikan menggunakan peraturan dan undang-undang yang baru.
2. Menambahkan jumlah sampel dan periode waktu penelitian.
3. Menambah pendekatan lain dalam mengukur kinerja keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Johan. 2005. "Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Pada Saat Fiscal Stress (Studi terhadap beberapa Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat)". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Vol. 06. No. 02. Agustus 2005: 105-124.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Florida, Asha. 2006. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatra Utara. *Tesis Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara*.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Tiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Tiga. Jakarta: Salemba Empat.

- Jogiyanto, 2007. Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman. Edisi 2007. Yogyakarta: BPFE
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Rukmana, Wan Vidi. 2013. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau". <http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/jurnal-WAN-VIDI-RUKMANA-090462201374-Akuntansi-2013.pdf>. May 22, 2014.
- Wenny, Cherrya Dhia. 2012. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatra Selatan". *Jurnal Ilmiah STIE MDP*. Vol. 02. No. 01. September 2012. Hal 39-51.



Hak Kopy (*copy right*) atas Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi ada pada penerbit dengan demikian isinya tidak diperkenankan untuk dikopi atau di-*email* secara masal atau dipasang diberbagai situs tanpa ijin tertulis dari penerbit. Namun demikian dokumen ini dapat diprint diunduh, atau di-*email* untuk kepentingan atau secara individual.